



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Eselon I Kemenpar RI. 1. Sekretaris Kementerian Pariwisata RI; 2. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata; 3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 4. Deputi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I; 5. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II;
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 September 2018.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr.Ir. Djoko Udjiyanto,M.M./Ketua Komisi X DPR RI. Dr.Hetifah,MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh., S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pendalaman RKA K/L TA 2019; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 26 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Ukus Kuswara/Sekretaris Kementerian Pariwisata RI; 2. Rizki Handayani/Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata; 3. Dadang Rizki Razman/Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 4. Ni Wayan Gri Adyani/Plt Deputi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I; 5. Nia Niscaya/Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.43 WIB oleh **DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.**/Ketua Komisi X DPR RI, kemudian rapat dipimpin oleh Dr.Hetifah,MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekretaris Kemenpar RI; Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; Deputi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Pendalaman RKA/KL TAHUN ANGGARAN 2019.

1. Pejabat Eselon I Kemenpar RI telah menyampaikan bahan rapat, memaparkan dan menjelaskan program-program pada APBN 2018 dan RAPBN TA 2019, serta program yang akan didanai oleh DAK Reguler dan DAK Penugasan TA 2019, sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan RAPBN TA 2019, antara lain:
 - a. Performansi Kemenpar RI Tahun 2018, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018, Capaian Kinerja per-September 2018, Daya Serap dan Strategi Percepatan Daya Serap Anggaran 2018.
 - b. Arah Kebijakan Pariwisata Tahun 2019, Target dan Sasaran Tahun 2019, Rencana Program dan Program Prioritas Tahun 2019, Anggaran Tahun 2019, dan Strategi Pencapaian Tahun 2019.
 - c. Arah Kebijakan, Perencanaan dan Pengalokasian, dan Kegiatan pada DAK Fisik Bidang Pariwisata TA 2019.
2. Berdasarkan Nota keuangan RAPBN TA 2019 dan Rapat Kerja tanggal 5 September 2018, Pagu Anggaran (sementara) RAPBN TA 2019 Kemenpar RI sebesar **Rp3.831.062.805.000,- (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)**, yang dialokasikan di masing-masing unit utama, sebagai berikut:

UNIT KERJA	Pagu Anggaran RAPBN TA 2019
Sekretariat Kementerian	319.650.562.000
Deputi Bidang Pengembangan Industri Dan Kelembagaan Kepariwisata	1.368.008.660.000
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	227.750.715.000
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I	862.510.270.000
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II	1.053.142.598.000
TOTAL	3.831.062.805.000

3. Dari masing-masing alokasi anggaran setiap Deputi, Kemenpar RI mengajukan rincian anggaran per Eselon II sebagai berikut:

Sekretariat Kementerian.

No	Unit Kerja Eselon II Sekretariat Kementerian	Pagu Anggaran 2019
1	Layanan Informasi (Biro Komunikasi Publik)	20.609.632.000
2	Layanan Keuangan (Biro Keuangan)	182.981.344.000
3	Layanan Umum (Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi)	100.536.513.000
4	Layanan Pengawasan (Inspektorat)	15.523.073.000
TOTAL		319.650.562.000

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata.

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata	Pagu Anggaran 2019
SATKER PUSAT (015127)	262.908.660.000
Pengembangan Manajemen Strategis	17.123.660.000
Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga	160.785.000.000
Pusat	1.368.008.660.000
Dekonsentrasi Pelatihan Dasar Kepariwisata	15.000.000.000
Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat	9.049.200.000
Pengembangan Wisata Budaya	19.000.000.000
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan	19.000.000.000
Pengembangan Industri dan Regulasi Pariwisata 1	27.000.000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Industri dan Kelembagaan	20.000.000.000
UPT MANDIRI	1.105.100.000.000
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG	154.491.023.000
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI	187.799.000.000
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR	124.692.587.000
AKADEMI PARIWISATA MEDAN	160.301.696.000
POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK	227.400.000.000
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG	250.415.694.000
TOTAL	1.368.008.660.000

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

No	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pagu Anggaran 2019
1	Asdep Investasi Pariwisata	16.150.000.000
2	Asdep Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Barat	14.600.000.000
3	Asdep Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Tengah	21.400.000.000
4	Asdep Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Timur	20.500.000.000
5	Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	48.225.000.000
6	Sekretariat Deputi	26.424.138.000
7	Badan Pelaksana Otorita Toba	37.451.577.000
8	Badan Pelaksana Otorita Borobudur	13.000.000.000
9	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo	10.000.000.000
10	Badan Pelaksana Otorita BTS	10.000.000.000
11	Badan Pelaksana Otorita Wakatobi	10.000.000.000
	Total	227.750.715.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I.

No	PENGEMBANGAN PEMASARAN I	Pagu Anggaran 2019
1	Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Wilayah I	406.730.281.000
2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapura dan Thailand	142.975.118.000
3	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei	113.082.660.000
4	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	108.641.585.000
5	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oseania	63.426.787.000
6	Sekretariat Deputi	27.653.830.000
TOTAL		862.510.270.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II.

No	PENGEMBANGAN PEMASARAN II	Pagu Anggaran 2019
1	Asdep Strategi dan Komunikasi Pemasaran II	352.984.196.000
2	Asdep Pengembangan Pemasaran Region I	181.690.668.000
3	Asdep Pengembangan Pemasaran Region II	147.180.676.000
4	Asdep Pengembangan Pemasaran Region III	167.693.529.000
5	Asdep Pengembangan Pemasaran Region IV	165.493.529.000
6	Sekretariat Deputi	30.000.000.000
7	Dekonsentrasi	8.100.000.000
TOTAL		1.053.142.598.000

4. Kemenpar RI mendapatkan alokasi program dan kegiatan yang akan didanai oleh DAK pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp1.003.439.180.993** dengan rincian sbb:
- DAK Reguler : Rp.700.000.000.000.
DAK Penugasan : Rp.303.439.180.993
5. Program Prioritas Kementerian Pariwisata Tahun 2019 sebagai berikut:
- Digital dan Milenial Tourism;
 - Homestay Desa Wisata;
 - Aksesibilitas Udara/Laut;
 - Branding/kehumasan;
 - Top-10 Originasi;
 - Top-3 Destinasi Branding;
 - Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - Sertifikasi Kompetensi SDM dan Gerakan Sadar Wisata;
 - Peningkatan Investasi Pariwisata;
 - Pengelolaan Crisis Center.

B. SIKAP DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI

1. Komisi X DPR RI dapat memahami rincian pagu anggaran Kemenpar RI pada RAPBN TA 2019, sebesar **Rp3.831.062.805.000,-** (*tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah*), dengan beberapa catatan sebagai berikut:
 - a. Kemenpar RI perlu menggagas penentuan destinasi penunjang dan destinasi wisata alternatif dan membuat strategi pengembangan destinasi wisata pada setiap provinsi/kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan wisatawan mancanegara.
 - b. Kemenpar RI perlu memberikan penjelasan rinci dari dampak berbagai penghargaan bidang pariwisata terhadap potensi kunjungan wisatawan.
 - c. Semua industri pariwisata perlu mempertimbangkan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai rujukan dalam penyusunan regulasinya.
 - d. Kemenpar RI agar segera melakukan kajian mengenai potensi dan permasalahan pendidikan pariwisata, baik yang berada di bawah Kemenristekdikti RI maupun Kemenpar RI, untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan K/L lain mengenai kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan pariwisata seperti dalam hal sarana prasarana dan SDM/Tenaga Pengajar
 - e. Kemenpar RI perlu mengklasifikasikan pelatihan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan wisman dan wisnus.
 - f. Mempelajari strategi pemasaran pariwisata negara lain dalam menarik wisatawan mancanegara, dan melakukan kajian mengenai pola pengeluaran belanja wisman dan wisnus serta realisasi target pengeluaran belanjanya.
2. Terhadap DAK Penugasan sebesar **Rp303.439.180.993.** (*Tiga ratus tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juga seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*), Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk mengacu atau mempertimbangkan destinasi-destinasi di luar 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.
3. Meminta Kemenpar RI untuk menyerahkan jawaban tertulis terhadap tanggapan, pertanyaan dan masukan Komisi X DPR RI paling lambat hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **15.00** WIB

KETUA RAPAT,



DR.HETIFAH SJAIFUDIAN,MPP

At.